

RINGKASAN

**ROKI AKBAR TANJUNG
NIM 200510009**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN
ILLEGAL DI SUNGAI TANGSE (Studi
Penelitian di Polres Pidie)
(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. dan
Muhibuddin, S.H., M.Hum.)**

Penambangan *illegal* di Sungai Tangse, Kabupaten Pidie menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpotensi merusak sumber daya alam yang berharga. Meskipun pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, Namun praktik *illegal* ini terus terjadi. Penegakan hukum, termasuk penindakan terhadap pelaku yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan kendala serta upaya yang dialami Polres Pidie untuk bertindak tegas terhadap para pelaku tambang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan *illegal* di Gampong Lhouk Keutapang, Kec. Tangse, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polres Pidie dalam proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Gampong Lhouk Keutapang, Kecamatan Tangse. Sumber data diperoleh melalui data primer dengan wawancara oleh Penyidik Tipidter dan Kasat Reskrim Polres Pidie. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian deskriptif, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan *illegal* di Gampong Lhouk Keutapang, Kecamatan Tangse, dilakukan dengan merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang larangan melakukan penambangan tanpa izin. Namun, hambatan seperti keterbatasan bukti dan sulitnya akses ke lokasi penambangan yang tersembunyi di daerah terpencil. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah meningkatkan koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup, meningkatkan patroli di wilayah rawan penambangan *illegal*, serta melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan *illegal*.

Saran yang dapat diberikan adalah penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan rutin, serta memperkuat pengawasan di daerah-daerah rawan penambangan *illegal* dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi aktivitas *illegal*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penambangan *Illegal*.

SUMMARY

**ROKI AKBAR TANJUNG
NIM 200510007**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE
CRIMINAL ACT OF ILLEGAL MINING IN
THE TANGSE RIVER (A Case Study at Pidie
District Police)**

**(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. and
Muhibuddin, S.H., M.Hum.)**

Illegal mining in the Tangse River, Pidie Regency causes environmental damage and has the potential to destroy valuable natural resources. Although the government has regulated mining activities through Law Number 3 of 2020 and Aceh Qanun Number 15 of 2017, this illegal practice continues to occur. Law enforcement, including action against perpetrators who do not have a Mining Business License (IUP), and the challenges and efforts faced by the Pidie Police to take firm action against mining offenders. This study aims to analyze the enforcement of law against illegal mining in Gampong Lhouk Keutapang, Tangse Subdistrict, and to identify the challenges and efforts made by the Pidie District Police in the law enforcement process.

The research uses an empirical juridical approach. The research location is in Gampong Lhouk Keutapang, Tangse Subdistrict. Data sources were obtained through primary data by conducting interviews with investigators from the Special Criminal Unit and the Head of the Criminal Investigation Unit at the Pidie District Police. Data analysis techniques involved data reduction, descriptive presentation, and drawing conclusions.

The results of this research indicate that law enforcement against illegal mining crimes in Gampong Lhouk Keutapang, Tangse District, is carried out with reference to Article 158 of Law Number 3 of 2020 regarding the Amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which regulates the prohibition of mining without a permit. However, obstacles such as limited evidence and difficulty accessing hidden mining locations in remote areas exist. Efforts made to overcome these obstacles include enhancing coordination among the Environmental Agency, increasing patrols in areas prone to illegal mining, and involving the community in monitoring and reporting illegal activities.

The suggestions provided include the importance of increasing public legal awareness through regular outreach programs and strengthening supervision in areas vulnerable to illegal mining by utilizing more advanced technology to detect illegal activities.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Illegal Mining.